



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 86500/MPK.F/TU/2020
Sifat : Sangat segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Upacara Peringatan
Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020

Jakarta, 28 September 2020

Yth. 1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Pimpinan Kementerian/Lembaga
3. Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi
4. Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota
(Daftar undangan terlampir)
Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020, dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, maka Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID-19, dilaksanakan melalui media elektronik, *Video Conference* atau dalam jaringan (*online*).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu berkenan mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila melalui media elektronik, *Video Conference* atau dalam jaringan (*online*), yang akan diselenggarakan pada

hari, tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020
pukul : 08.00 s.d. 08.30 WIB
agenda : Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020
pakaian : 1. Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
2. Wanita : Pakaian Nasional dan/atau menyesuaikan
3. TNI/POLRI : Pakaian Dinas Upacara (PDU) III.

Perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, *link video conference* akan kami kirim melalui surat elektronik (surel).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara

Daftar Lampiran Undangan
Nomor : 86500/MPK.F/TU/2020
Tanggal : 28 September 2020

KEMENTERIAN

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Menteri Sekretaris Negara
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Luar Negeri
7. Menteri Dalam Negeri
8. Menteri Pertahanan
9. Menteri Keuangan
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Menteri Perindustrian
12. Menteri Perdagangan
13. Menteri Pertanian
14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Menteri Ketenagakerjaan
16. Menteri Perhubungan
17. Menteri Kelautan dan Perikanan
18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19. Menteri Kesehatan
20. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
21. Menteri Agama
22. Menteri Sosial
23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24. Menteri Komunikasi dan Informatika
25. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
26. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
28. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
29. Menteri Badan Usaha dan Milik Negara
30. Menteri Pemuda dan Olah Raga
31. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32. Jaksa Agung
33. Sekretaris Kabinet

Daftar Lampiran Undangan
Nomor : 86500/MPK.F/TU/2020
Tanggal : 28 September 2020

LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN

1. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
6. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla)
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
14. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
15. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
16. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
17. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
18. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
19. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
20. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)
21. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPM)
22. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)
23. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
25. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
26. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
27. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (ANRI)
28. Ketua Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS)
29. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
30. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
31. Kepala Badan Sar Nasional (BASARNAS)
32. Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)
33. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
34. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
35. Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
36. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
37. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
38. Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
39. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
40. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
41. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
42. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
43. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
44. Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP)
45. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
46. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
47. Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
48. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
49. Ketua Komisi Hukum Nasional
50. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
51. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
52. Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
53. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
54. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)